Pranatan Anyar

DPRD DIY KEMBALI USULKAN PEMBATASAN SOSIAL

Masyarakat Cenderung Abai Prokes

YOGYA (KR) - Sekda DIY Baskara Aji mengakui jika masyarakat DIY saat ini sudah abai dengan protokol kesehatan (prokes). Salah satu buktinya saat libur Natal kemarin. Beredar foto di media sosial, tentang abainya wisatawan saat berada di Malioboro.

"Saya sepakat dengan itu. Kalau saat ini masyarakat mulai abai dengan Covid-19. Entah itu masyarakat DIY atau luar, tetap saja yang terkena imbasnya adalah warga DIY. Karena lokasinya ada di DIY," ujar Baskara Aji dalam rapat dengan Pimpinan DPRD DIY terkait perkembangan kasus Covid-19 di DIY, Selasa (29/12).

Di sisi lain, Aji mengungkapkan ada kejenuhan dari petugas Gugus Tugas. Karena bencana ini sudah berjalan lebih dari tujuh bulan. Sosialisasi tentang prokes saat ini masih menjadi tantangan bagi Gugus Tugas, bukan di penanganan pasien.

Satpol PP maupun petugas lain tidak mungkin mengawasi penerapan prokes sampai ke tingkat RT/RW. Untuk itu, Pemda DIY terus berkomunikasi dengan kabupaten/kota yang juga didukung TNI/Polri untuk terus sosialisasi disiplin prokes.

Mengenai wacana penutupan sejumlah objek utama kunjungan masyarakat di DIY pada malam pergantian tahun nanti, Pemda DIY sudah berkomunikasi dengan Pemkot Yogyakarta. Namun pada intinya Pemda DIY segera meminta kepada Pemkot agar segera memutuskan rencana *lockdown* terbatas tersebut.

"Untuk pembatasan pergerakan orang, kami juga terus berkomunikasi dengan kabupaten/kota. Terutama di pintu masuk DIY. Meskipun Gubernur secara tegas telah mewajibkan *rapid test* antigen bagi pendatang di DIY, tetap ada kesulitan khususnya bagi pemakai kendaraan pribadi dan bus," ujarnya.

Desakan adanya pembatasan pergerakan manusia dan sosial salah satunya datang dari DPRD DIY. Salah satu pertimbangannya, lonjakan kasus positif Desember ini sangat signifikan. Berbeda saat Maret-September yang dinilai masih landai.

"Tapi kasus 5.000 ke atas itu ada dalam dua bulan terakhir. Apalagi Desember ini. Lonjakannya luar biasa. Sekuat apapun tenaga kesehatan di rumah sakit kita, tetap tidak akan mampu mengatasi lonjakan kasus. Apalagi saat ini hampir setiap hari kasus positif selalu di atas angka 200," ujar Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana.

Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menekan lonjakan kasus ini, adalah pembatasan pergerakan manusia dan sosial. Apalagi menjelang pergantian tahun, sosialisasi protokol kesehatan sudah tidak lagi cukup.

"Untuk itu kita dukung jika Malioboro, Tugu dan Titik Nol ditutup saat tahun baru nanti. Sebab, jika ada kerumunan kita tidak bisa menyalahkan petugas. Karena memang kerumunannya luar biasa. Libur Natal kemarin dapat dijadikan bahan evaluasi," ungkapnya. **(Awh/Bro)-d**

KR-Istimewa

MASKER FASHION: Masker bukan hanya untuk protokol kesehatan pencegahan Covid-19, namun sejumlah fashion designer ternama mulai merancang masker sebagai bagian dan brand gaya hidup. Seperti dalam Pameran Masker Indonesia di Galeria Mall Yogyakarta mulai Minggu (27/12) lalu, yang diikuti desainer Ayu Ghia Sugandhi, Ronny Bilardo, Sang Hermana dan Fariz Ashar serta Ardani Harja. Acara dibuka oleh desainer Lia Mustafa, menampilkan tema Fashion Reduced, Reused and Recycle. Para perancang mode menampilkan beragam bahan mulai batik sampai tenun Tanah Air.

BANYAK PENJUAL MAKANAN ABAIKAN PROKES

Ingin Aman, Pilih yang Pakai Masker

YOGYA (KR) - Kendati sudah diperingatkan berkali-kali, namun belum seluruh masyarakat sadar untuk melaksanakan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Termasuk pada pedagang makanan dan minuman yang masih mengabaikan prokes, seperti tidak memakai masker dan tidak menyediakan fasilitas cuci tangan.

"Memang masih saja ditemukan pedagang yang belum mematuhi prokes. Seperti tidak memakai masker atau menyiapkan fasilitas prokes. Saya sungguh menyayangkan hal itu. Karena jika mereka tidak memakai masker, tidak hanya merugikan diri, tapi juga orang di sekitarnya," ujar Sekda DIY K Baskara Aji di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (29/12).

Baskara Aji mengungkapkan, banyaknya kasus positif menjadi indikator Covid-19 tidak boleh disepelekan. Jadi bukan sekadar persoalan sakit tapi lebih kepada keselamatan jiwa. Karenanya, prokes menjadi kewajiban, termasuk bagi para pelaku usaha atau pedagang makanan dan minuman di pinggir-pinggir jalan, di pasar tradisional, maupun di gedung-gedung. Pelayan yang menyajikan makanan dan minuman pun wajib menerapkan prokes ini.

"Masyarakat semakin cerdas. Wajar jika banyak yang tidak jadi membeli makanan atau minuman karena pedagang atau pelayannya tidak memakai masker. Jadi sebenarnya pedagang sendiri yang rugi. Apa sulitnya pakai masker, jangan hanya mengandalkan aparat saja, karena jumlahnya terbatas," tegas Baskara Aji.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Sutono menyatakan, 30 pasar tradisional di Kota Yogyakarta telah menerapkan prokes. Bahkan seluruh pasar rakyat di Kota Yogya telah menggelar *Reresik Pasar* untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman jelang pergantian tahun ini.

"Kami pastikan seluruh pasar tradisional di Kota Yogya sudah menerapkan protokol kesehatan. Karena kami tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada pedagang maupun pembeli untuk mengingatkan. Jika ada yang melanggar kami hanya sebatas mengingatkan. Yang memberi sanksi petugas Satpol PP sesuai kewenangannya," ujar Yunianto. **(Ria/Ira)-d**

Terima Tamu Tanpa Skrining, Hotel Ditegur

YOGYA (KR) - Beberapa hotel nonanggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mendapat peringatan dari Dinas Pariwisata DIY, karena kedapatan menerima tamu tanpa melakukan skrining sesuai regulasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di masa libur Natal dan tahun baru (Nataru) ini.

"Baru sebatas peringatan atau teguran, tetapi bila kedapatan melanggar kembali, peringatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur dengan kebijakan dari Pemkot atau Pemkab secara berjenjang, yang endingnya bisa dilakukan pencabutan izin," tegas Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo kepada *KR*, Senin (28/12) sore, di Kampus Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, usai menjadi narasumber di channel YouTube 'Kutunggu di Pojok Ngasem' yang dipandu Wakil Rektor Bidang 3 UWM Puji Qomariyah SSos MSi.

Menurut Singgih, untuk hotel anggota PHRI telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dalam sosialisasi dan implementasi prokes Covid-19. Diakui, tantangan terberat Dinas Pariwisata di masa pandemi Covid-19 ini adalah pariwisata identik dengan pergerakan dan menyinkronkan kesehatan dengan kemauan pariwisata. "Pariwisata *outdoor* seperti di pantai dan desa wisata yang menjadi favorit saat ini, namun tetap harus memenuhi prokes, 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak/hindari kerumunan) dengan Pranatan Anyar Plesiran Jogja," ujarnya.

Menjalankan prokes pariwisata telah dilakukan pembatasan maksimal jumlah wisatawan dalam satu destinasi. "Bila destinasi penuh bisa diarahkan ke destinasi wisata lain di sekitarnya," ucap Singgih.

Puji Qomariyah mengatakan, kanal 'Kutunggu di Pojok Ngasem' sudah memasuki Episode 6 dengan menghadirkan narasumber berkompeten juga menjadi ajang pameran seni. **(R-4)-d**

TINGKATKAN KESEMBUHAN PASIEN

Cilacap Gunakan Plasma Konvalesen

CILACAP (KR) - Sampai akhir Desember ini jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Cilacap mencapai 3.385 orang, meliputi 2.631 telah sembuh dan 105 meninggal. Tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Cilacap mencapai 77,7 persen, sedangkan tingkat kematian sekitar 3,1 persen.

Untuk meningkatkan kesembuhan pasien Covid-19, Pemkab Cilacap melalui Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sedang mengembangkan metode penyembuhan dengan plasma konvalesen. "Metode tersebut merupakan terapi pengobatan Covid-19 menggunakan plasma darah pasien yang telah sembuh. Selanjutnya plasma tersebut diberikan kepada pasien yang masih sakit," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dr Pramesti Griana Dewi, Selasa (29/12).

Metode tersebut diyakini telah berhasil menyembuhkan Bupati Cilacap Tatto S Pamuji dan istri, yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 pada awal Desember lalu. Untuk mempercepat kesembuhan pasien Covid-19, metode itu dikembangkan untuk pasien lainnya. "Saat ini, kami telah mengumpulkan data penyintas Covid-19 dari tiap-tiap Puskesmas yang memenuhi syarat sebagai pendonor plasma," ungkap Pramesti.

Menurutnya, Dinas Kesehatan Cilacap juga telah mengajukan usulan pengadaan alat berupa freezer plasma dan pengencer plasma. Dengan demikian, plasma yang berhasil dikumpulkan tidak lagi dititipkan ke PMI di daerah lain, tetapi dapat disimpan di Cilacap . **(Mak)-d**

PENANGANAN COVID-19

Kulonprogo Keluarkan Perbup Baru

KULONPROGO (KR) - Pemkab Kulonprogo mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) No 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup No 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Ada tiga pasal yang diubah, yaitu Pasal 9, penanganan orang dengan RT-PCR test positif, Pasal 11 penanganan terhadap kontak erat dengan RT-PCR test positif, dan Pasal 17 pelaksanan isolasi mandiri orang dengan RT-PCR test positif tanpa gejala atau gejala ringan," kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo drg Baning Rahayujati MKes, Selasa (29/12).

Dijelaskan Baning, dalam hal RT-PCR test positif tanpa gejala dilakukan isolasi mandiri selama 10 hari sejak sampel swab diambil, dengan gejala ringan ditambah tiga hari sejak gejala hilang. "Sedangkan bila selama isolasi mandiri terjadi perubahan gejala menjadi sedang atau berat, maka Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) melakukan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan," urainya.

Terhadap aktivitas malam tahun baru, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo Fajar Gegana mengimbau agar warga Kulonprogo tidak melakukan aktivitas berkerumun. Kalau mau merayakan sebaiknya di rumah saja. Bagi yang berwisata wajib mematuhi protokol kesehatan. "Bagi yang datang dari luar Kulonprogo minimal *rapid test* antibodi. Kalau yang mau wisata wajib mengantongi *rapid test* antigen dan ini peraturan dari provinsi," ujarnya. **(Wid)-d**

Liburan, Operasi Yustisi Diintensifkan

KR-Franz Boedisoekarnanto

Petugas di Pos 5 Malioboro memeriksa pengendara yang melintas di kawasan Malioboro.

YOGYA (KR) - Untuk menekan laju penambahan kasus Covid-19 yang semakin bertambah banyak dengan jumlah kasus harian cukup tinggi, Pemda DIY kian mengintensifkan operasi yustisi di jalan-jalan dan pusat-pusat keramaian. Langkah ini sekaligus untuk mengedukasi masyarakat agar patuh dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

"Dari pantauan kami pukul 08.00-16.00 di Pos 5 Malioboro, masih ditemukan sejumlah pelanggaran, terutama pemakaian masker. Bagi pelaku pelanggaran kami langsung beri peringatan. Sementara bagi pendatang dari luar daerah kami minta menunjukkan hasil *rapid test* antigen," kata Anggota Satpol PP Pemda DIY/ Koordinator Pos 5 Malioboro Agus Pranowo di Gerbang Barat Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Selasa (29/12).

Agus mengungkapkan, momentum libur Natal dan tahun baru (Nataru) diprediksi akan terjadi lonjakan pengunjung di kawasan Malioboro. Untuk menekan penyebaran Covid-19, operasi yustisi semakin digencarkan pada 24-31 Desember.

"Ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian kami dalam operasi yustisi. Di antaranya pemakaian masker, berkerumun, kawasan tanpa rokok dan pendatang dari luar kota. Dari pantauan kami, masih ada masyarakat yang tidak memakai masker, bahkan terjaring 50 pelanggar," ungkap Agus.

Kasus baru positif Covid-19 di DIY kembali mencatat angka tertinggi untuk penambahan kasus harian, yakni 282 kasus sehingga total menjadi 11.326 kasus. Sedangkan pasien sembuh bertambah 295 menjadi 7.718. Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih menjelaskan, kasus baru ini didominasi domisili di Kabupaten Sleman 100 orang, Kota Yogya 86, Bantul 55, Gunungkidul 31, dan Kulonprogo 10.

Di sisi lain, pasien sembuh juga mencatat rekor tertinggi bertambah 295 menjadi 7.718. Mayoritas domisili Sleman 218 orang, Bantul 34, Kulonprogo 20, Gunungkidul 15 dan Kota Yogya delapan. Sementara pasien meninggal bertambah 10 orang menjadi 249 kasus. **(Ria/Ira)-d**

Dapur Umum untuk Warga Terdampak Covid-19

TEMANGGUNG (KR) - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Temanggung mendirikan dapur umum untuk membantu mencukupi kebutuhan konsumsi warga terdampak pandemi Covid-19.

Wakil Bupati Temanggung Herry Ibnu Wibowo mengatakan, dapur umum berlokasi di samping Pendapa Pengayoman kompleks Rumah Dinas Bupati Temanggung. Dapur ini di antaranya terdapat tenda untuk memasak dan membungkus hasil masakan. "Hasil masakan seperti nasi bungkus dibagikan kepada warga di pasar tradisional, tukang becak dan permukiman," kata Herry Ibnu Wibowo, Selasa (29/12).

KR-Zaini Arrosyid

Relawan membungkus nasi untuk selanjutnya diberikan kepada warga terdampak pandemi Covid-19.

Pendirian dapur umum, menurut Herry, sebagai bentuk sinergitas Forkompimda dan kepedulian pada warga terdampak pandemi Covid-19, bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19. Pada Selasa, nasi bungkus yang disajikan sekitar 450 bungkus.

Pada beberapa bulan lalu, ungkapnya, telah pula didirikan dapur umum di Kodim 0706 Temanggung, Polres Temanggung dan Pemkab. Karena saat itu Temanggung masuk zona merah, sehingga energi terkonsentrasi untuk penanganan. Baru akhir tahun bisa didirikan kembali dapur umum. "Alhamdulillah kini sudah turun menjadi zona oranye, diharapkan perlahan-lahan masuk zona kuning dan hijau," harapnya.

Herry mengingatkan masyarakat untuk tetap ketat menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, gunakan masker, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta jauhi kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19.

Ia berharap pada 2021 sudah tidak ada lagi dapur umum untuk melayani masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan catatan vaksin sudah diberikan dan masyarakat sehat serta punya kekebalan tubuh yang baik. **(Osy)-d**

KEMENKES IMBAU RS RUJUKAN COVID-19

Tambah Kapasitas Tempat Tidur 40%

JAKARTA (KR) - Kementerian Kesehatan mengimbau seluruh Rumah Sakit Rujukan Pasien Covid-19 untuk menambah kapasitas tempat tidur perawatan pasien sebanyak 30-40 persen dari yang ada saat ini.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Prof dr Abdul Kadir menyatakan, Kemenkes telah menerbitkan Surat Edaran kepada semua Kepala Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia dan seluruh Direktur Utama Rumah Sakit untuk menambah tempat tidur perawatan pasien Covid-19.

"Penambahannya sekitar 30-40 persen dari tempat tidur yang ada sekarang. Tentunya kami mengharapkan penambahan itu untuk ruangan isolasi dan ICU," katanya di Jakarta kemarin.

Selain itu, khusus untuk 34 rumah sakit yang berada di bawah Kemenkes telah dilakukan penambahan 1.297 tempat tidur. Khusus untuk daerah Jabodetabek, rumah sakit yang berada di bawah Kemenkes mampu menambah 497 tempat tidur.

Abdul Kadir mengingatkan, pasien Covid-19 yang bergejala ringan atau tanpa gejala dapat menggunakan ruangan isolasi yang telah disiapkan Pemerintah. Demikian juga dengan pasien bergejala sedang, bisa ditampung di rumah sakit atau isolasi. Tetapi, khusus untuk mereka yang konfirmasi positif dan gejalanya berat sampai kritis, harus masuk rumah sakit secepatnya.

"Harapan kita kalau hal ini dilaksanakan dengan baik oleh para Direktur Utama Rumah Sakit, buku panduan dijadikan pedoman dalam penanganan pasien rumah sakit, maka tentunya kita mengharapkan pasien yang akan masuk ke rumah sakit tidak akan terlalu penuh," katanya. **(Ati)-d**